

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional PP.No.19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa: Penyelenggaraan pendidikan disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan mengacu pada standar nasional dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam kebijakan ini, bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah, bagi siswa, dan masyarakat untuk berorientasi pada pengembangan peningkatan mutu siswa di sekolah.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan atas mutu dan efisiensi pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam hal ini, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, serta dalam membina perkembangan satuan pendidikan dan mutu sekolah yang bersangkutan (Dep.P&K Dir.Jend.Dikti.1995: 1).

Berbagai upaya pemerintah untuk merealisasikan pembangunan pendidikan nasional bagi seluruh anak usia sekolah yang dibentuk dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang Wajib Belajar 9 tahun bagi seluruh anak usia sekolah telah dilaksanakan pemerintah. Upaya realisasi ini sudah dimulai melalui pembangunan-pembangunan fasilitas pendidikan dan penunjang pendidikan, seperti : sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan tenaga pendidik yang bertujuan

untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan guna peningkatan mutu pendidikan bagi semua generasi penerus bangsa Indonesia, seperti tercantum dalam UUD 45.

Keadaan persebaran sekolah, terutama pada pendidikan SMA tidak terlepas dari daerah asal sejumlah siswa dan para guru yang akan melaksanakan kegiatan proses belajar dan mengajar. Namun dengan kemajuan fasilitas dan sarana transportasi, telah mampu mendukung kelancaran dalam mencapai tempat sekolah, yang seluruh fasilitas pembelajarannya telah disediakan pada setiap sekolah yang bersangkutan.

Bahkan pada setiap tempat pendidikan di sekolah yang ideal, fasilitas kelas terhadap daya tampung sejumlah siswa perlu diperhatikan. Guru bidang studi harus sesuai keahlian kualifikasinya, kondisi semacam ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan sertifikasi setiap guru bidang studi sesuai dengan gaji pokok yang diberikan setiap bulannya kepada guru. Namun hal penting yang harus dilakukan guru, harus memenuhi standar pengajarannya sebanyak 24 jam per minggu pada sekolah yang diajarkannya.

Atas dasar hal tersebut, nampaknya banyak ditemui ketidaksesuaian tugas guru mengajar di sekolahnya terhadap pemenuhan jam mengajar guru pada setiap sekolah yang ditempati. artinya perbandingan guru terhadap materi bidang studi yang diajarkan harus sesuai kebutuhan sekolah. Perbandingan guru dan sejumlah siswa tidak boleh terlalu banyak, agar perhatian guru terhadap siswa menjadi lebih baik sehubungan dengan perbaikan mutu dan proses pembelajaran.

Suatu hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius bagi Dinas Pendidikan di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Pesawaran, sebelum membicarakan mutu lulusan siswa di wilayah tugasnya, hendaknya perlu memperhatikan sebaran kebutuhan tenaga guru pada setiap sekolahnya, agar disesuaikan dengan kualifikasi bidang studi yang diajarkan di setiap sekolah.

Hal ini penting, karena pada setiap tempat pendidikan jenjang SMA khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran, sebaran Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sejumlah guru ter-akumulasi pada SMA yang ada di daerah/kecamatan tertentu. Sedangkan kebutuhan guru di sekolah itu, sudah tidak lagi memerlukan guru tersebut. Atas dasar keadaan tersebut, sebaran guru dalam tugasnya dan sejumlah siswa yang tersebar di sekolah-sekolah SMA, yang berada diberbagai daerah dalam menunjang keberhasilan UU wajib belajar 9 tahun, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah agar berjalan lebih efektif.

Bertolak dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis sebaran kebutuhan guru, hal ini sangat penting bagi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak, dalam pembinaan dan pengawasan pada setiap tingkat pendidikan yang tersebar luas di wilayah tugasnya. Oleh karena itu, analisis sebaran kebutuhan guru sangat penting segera diwujudkan. Mengingat banyaknya tugas dan luasnya wilayah jangkauan pihak Dinas Pendidikan, maka analisis kebutuhan guru tersebut dapat memberikan informasi dan gambaran menyeluruh keberadaan kebutuhan guru berdasar kualifikasi pada setiap SMA yang berada di Kabupaten Pesawaran.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitiannya, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sebaran kebutuhan guru geografi SMA Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimanakah Sebaran guru geografi SMA di setiap kecamatan di kabupaten pesawaran?
3. Apa latar belakang pendidikan guru geografi di kabupaten pesawaran?
4. Bagaimanakah status kepegawaian guru geografi di kabupaten pesawaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mendapatkan informasi jumlah guru bidang studi geografi yang dibutuhkan di setiap SMA di Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk mendapatkan informasi tentang Sebaran guru geografi disetiap kecamatan di Kabupaten Pesawaran.
- c. Untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang pendidikan guru geografi SMA di Kabupaten Pesawaran.
- d. Untuk mendapatkan informasi tentang status kepegawaian guru geografi SMA di Kabupaten Pesawaran.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan geografi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di perguruan tinggi dengan fenomena di lapangan.
3. Sebagai bahan kajian terhadap teori yang telah diperoleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di Universitas Lampung sekaligus sebagai bahan di perpustakaan insitusi pendidikan.
4. Sebagai Bahan Pembaharuan data untuk dinas-dinas dan instansi terkait.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup objek adalah kebutuhan guru, sebaran guru di setiap kecamatan, latar belakang pendidikan dan status kepegawaian guru geografi.
2. Ruang lingkup subjek adalah kepala sekolah dan guru yang mengajar mata pelajaran geografi.
3. Ruang lingkup tempat 19 SMAN dan SMAS di Kabupaten Pesawaran Provonsi Lampung Tahun 2015.
4. Ruang lingkup waktu tahun 2015
5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini yaitu geografi sosial.

Geografi sosial merupakan ilmu yang mempelajari seluk beluk penyebaran, pertumbuhan, perilaku, dan permasalahan manusia di permukaan bumi

(Nursid Sumaatmadja, 1988:53). Dipilihnya geografi sosial sebagai ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini karena geografi sosial mengkaji tentang permasalahan manusia di permukaan bumi, salah satunya yakni permasalahan di bidang pendidikan. Masalah pendidikan dalam penelitian ini adalah kebutuhan guru geografi di setiap SMA di Kabupaten Pesawaran tahun 2015.